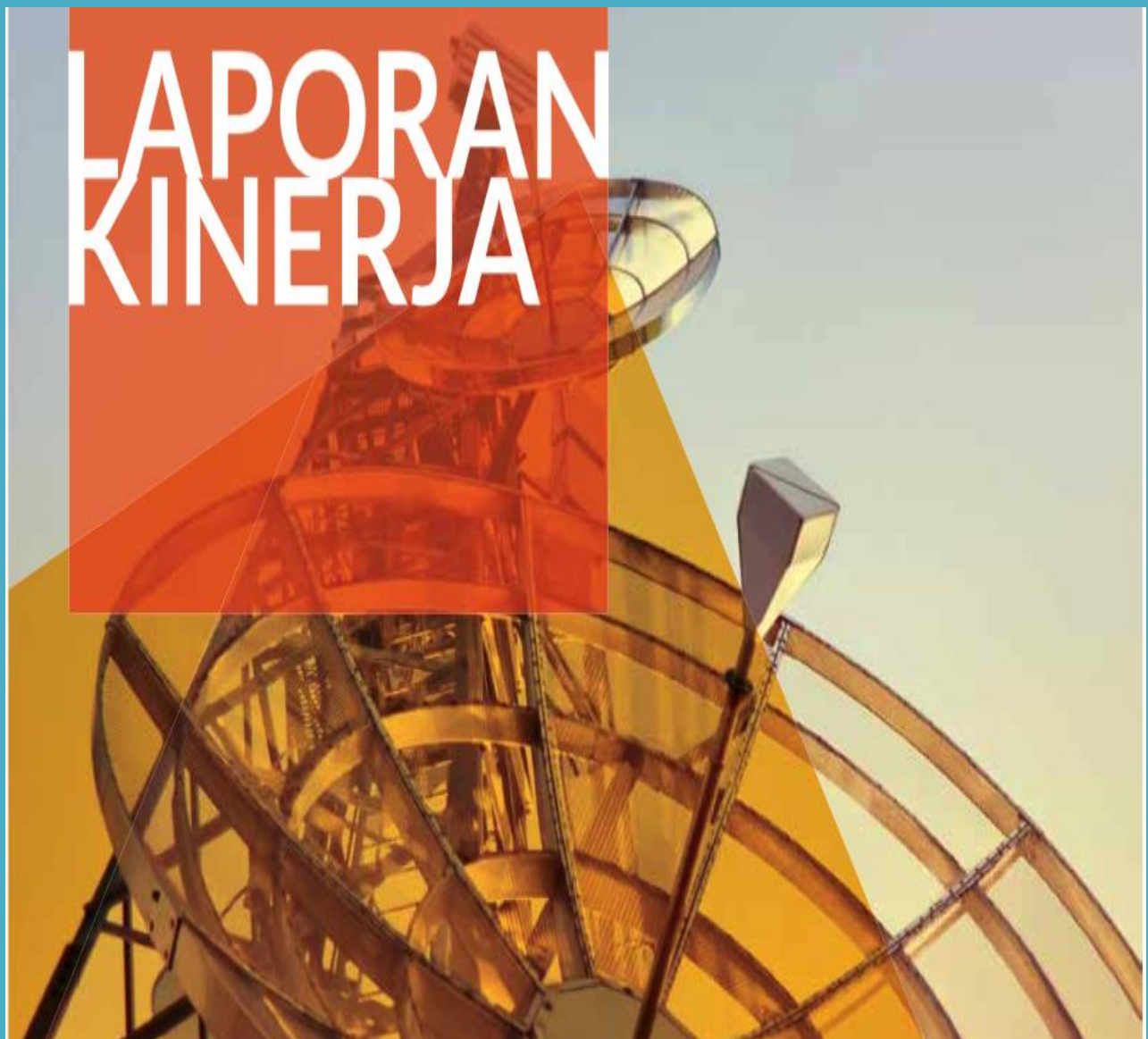


**LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA  
(LAKIN)**

***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023***



**KABUPATEN BANGKA  
2023**

## KATA PENGANTAR

Amanat ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1999 menghendaki penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ditindak lanjuti dengan dengan Intruksi Presiden RI Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan sumberdaya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditentukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun guna memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan selama periode APBD 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan berupa saran, tanggapan dan pendapat sangat kami harapkan

Akhirnya dengan diiringi niat tulus dan senantiasa memohon Ridho-Nya semoga LAKIN ini dapat menjadi bahan pengendalian dari aspek manajemen pemerintahan yang akuntabel dalam rangka mewujudkan *Good Government* dan *Clean Government*

Sungailiat, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Bangka,



DIAN FIRNANDY, SE  
NIP. 197911182008041001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
EKSEKUTIF SUMMARY .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. ASPEK STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN .....	16
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	12
D. LANDASAN HUKUM .....	16
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIN TAHUN 2019 .....	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS .....	19
B. TUJUAN DAN SASARAN .....	21
C. STRATEGI,KEBIJAKAN,INDIKATOR SASARAN,PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM .....	21
D. OUTPUT/OUTCOME HASIL TAHUN 2022 YANG INGIN DICAPAI MENGACU KEPADA PERJANJIAN KINERJA YANG SUDAH DITETAPKAN DIAWAL TAHUN ANGGARAN 2023.....	26
E. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	27
F. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA OPD .....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	33
B. REALISASI ANGGARAN.....	46
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	48
B. HAMBATAN KENDALA .....	49
C. PEMECAHAN MASALAH.....	49
LAMPIRAN	
- LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2023	
- PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN). Penyusunan LAKIN Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, agar dapat berjalan dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan aturan yang ada, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penanaman modal. Dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat membutuhkan mekanisme yang sistematis dan terukur untuk dapat menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan pelayanan masyarakat tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, agar dapat berjalan dengan bertanggungjawab dan sesuai dengan aturan yang ada, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka dan Penetapan Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka hal ini mengacu pada beberapa kebijakan-kebijakan akan penanaman modal yang tercantum dalam :

- a. UU No.25 Tahun 2007 pasal 4 meliputi upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dalam rangka penguatan daya saing perekonomian Nasional yaitu mempercepat peningkatan penanaman modal serta memberikan perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang telah melakukan pembagian urusan pemerintahan kepada Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal.

### **1.1. Sumber Daya Aparatur.**

Untuk melaksanakan visi dan misi organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka di dukung struktur dan aparatur, yaitu:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas, membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu koperasi usaha kecil dan menengah.

## 2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan surat menyurat, rumah tangga, barang, perlengkapan, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, hubungan masyarakat, informasi.

*Sekretariat terdiri dari :*

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Jabatan Fungsional Perencana;
- c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

## 3. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pelayanan perizinan satu pintu serta survey lapangan di Bidang Pelayanan Perizinan.

*Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :*

- a. Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda;

## 4. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal.

*Bidang Penanaman Modal terdiri dari :*

- a. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal;

## 5. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Pengawas Koperasin Ahli Muda;
- b. Analis Kebijakan

6. Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Pranata Komputer Ahli Muda;
- b. Pranata Humas.

Jumlah PNS pada Jabatan Struktural dan Staf : 64 orang

- Kepala Dinas = 1 orang
- Sekretaris = 1 orang
- Kepala Bidang = 4 orang
- Jabatan Struktural = 1 Orang
- Jabatan Fungsional = 15 orang
- PPPK = 2 orang
- Fungsional Umum = 12 orang
- Tenaga kontrak = 28 orang

1.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas operasional, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah memiliki prasarana dan sarana kerja sebagaimana terinci pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Aset/Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Desember 2023**

Spesifikasi Barang			Tahun Perolehan	Ukuran Barang	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
No Urut	Nama / Jenis Barang (108)	Merk/ Type								
1	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	2007	1784 M2	Bidang	B	1	Rp 114.176.000,00	Rp 114.176.000,00	
2	Portable Generating Set	Perkins	2009	30 KVA	Unit	B	1	Rp 149.000.000,00	Rp 149.000.000,00	-
3	Station Wagon	Toyota/ Avanza	2010	-	Unit	B	1	Rp 141.100.000,00	Rp 141.100.000,00	Peralihan dari Korpri 2016 BN 1501 QZ/ BN 2076 BZ

4	Station Wagon	Daihatsu Xenia M/T	2008	1298 cc	Unit	B	1	Rp 106.000.000,00	Rp 106.000.000,00	BN 2135 BZ / BN 1637 QZ
5	Station Wagon	Toyota/Avanza	2009	-	Unit	B	1	Rp 143.000.000,00	Rp 143.000.000,00	BN 1061 BZ (Peralihan dari BPM 2015) / BN 1635 QZ
6	Station Wagon	Toyota New Avanza Veloz	2012	1500 cc	unit	B	1	Rp 172.190.000,00	Rp 172.190.000,00	BN 2803 BZ- BN 1552 QZ / BN 1636 QZ
7	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5570 BZ / BN 5317 QZ
8	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5659 BZ
9	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5612 BZ / BN 5318 QZ
10	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5585 BZ / BN 5316 QZ
11	Sepeda Motor	Honda/ NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5599 BZ/ BN 5314 QZ (Peralihan dari BPM 2015)
12	Sepeda Motor	Honda/ NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5565 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
13	Sepeda Motor	Honda/ NF 100 SE	2007	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5653 BZ (Peralihan dari BPM 2015) / BN 5315 QZ
14	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5698 BZ / BN 5572 QZ
15	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5699 BZ / BN 5566 QZ/ BN 5895 QZ
16	Sepeda Motor	Honda Supra Fit/NF 100 SE	2008	100 cc	Unit	B	1	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	BN 5700 BZ / BN 5565 QZ
17	Sepeda Motor	Honda/ NF 125 TD	2009	125 cc	Unit	B	1	Rp 12.826.000,00	Rp 12.826.000,00	BN 7124 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
18	Sepeda Motor	Jupiter Z1	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.000,00	Rp 14.949.000,00	BN 2014 QZ (Peralihan dari BPM 2015)
19	Sepeda Motor	Jupiter Z1	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.000,00	Rp 14.949.000,00	BN 2007 QZ (Peralihan dari BPM 2015)
20	Sepeda Motor	Jupiter Z1	2014	113,7 cc	Unit	B	1	Rp 14.949.200,00	Rp 14.949.200,00	BN 2013 QZ (Peralihan dari BPM 2015)

										2015)
21	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Meteran otomatis merk Sanfix SD-100a Laser distance meter	2015	-	Unit	B	1	Rp 3.800.000,00	Rp 3.800.000,00	-
22	Radiation Monitor Isotropic	intel instrument plus	2014	30-300 Hz	Unit	B	1	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	-
23	Global Positioning System	Garmin Montan a 650	2013	-	Unit	B	2	Rp 6.975.000,00	Rp 13.950.000,00	-
24	alat ukur universal lainnya (dst)	Fluke 1621	2014	-	Unit	B	1	Rp 17.000.000,00	Rp 17.000.000,00	-
25	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Ollventi Linga 98"	2008	-	Unit	B	1	Rp 4.264.200,00	Rp 4.264.200,00	-
26	Lemari Besi/Metal	Brother	2007	-	Unit	B	6	Rp 1.935.990,00	Rp 11.615.940,00	-
27	Lemari Besi/Metal	Brother	2010	-	Unit	B	2	Rp 2.248.000,00	Rp 4.496.000,00	Peralihan dari BPM 2015
28	Rak Besi	-	2015	30x30	Unit	B	3	Rp 6.650.000,00	Rp 19.950.000,00	
29	Rak Kayu	Standar	2009	-	Unit	B	1	Rp 245.000,00	Rp 245.000,00	-
30	Rak Kayu	Standar	2009	-	Unit	B	1	Rp 2.480.000,00	Rp 2.480.000,00	-
31	Rak Kayu	Standar	2011	-	Unit	B	2	Rp 3.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-
32	Rak Kayu	Standar	2014	-	Unit	B	2	Rp 7.500.000,00	Rp 15.000.000,00	-
33	Filing Cabinet Besi	Brother	2007	-	Unit	B	10	Rp 1.494.990,00	Rp 14.949.900,00	-
34	Filing Cabinet Besi	Elite	2008	-	Unit	B	10	Rp 1.853.073,00	Rp 18.530.730,00	-
35	Filing Cabinet Besi	Yunika	2008	-	Unit	B	10	Rp 1.816.920,00	Rp 18.169.200,00	Peralihan dari BPM 2015
36	Filing Cabinet Besi	Brother	2014	-	Unit	B	4	Rp 1.870.000,00	Rp 7.480.000,00	Peralihan dari BPM 2015
37	Brandkas	Ichiban	2007	-	Unit	B	1	Rp 4.630.500,00	Rp 4.630.500,00	-
38	Brandkas	-	2016	-	Unit	B	1	Rp 9.850.000,00	Rp 9.850.000,00	-
39	Lemari Kaca	Standar	2009	-	Unit	B	1	Rp 3.699.270,00	Rp 3.699.270,00	-
40	Lemari Kaca	Standar	2010	-	Unit	B	2	Rp 2.490.000,00	Rp 4.980.000,00	-
41	Lemari Kaca	Berdiri (2 pintu)	2015	180x90	Unit	B	1	Rp 2.600.000,00	Rp 2.600.000,00	

42	Lemari Kaca	Memanj ang (geser)	2015	100x200	Unit	B	1	Rp 2.900.000,0 0	Rp 2.900.000, 00	
43	Papan Visual/Papan Nama	Standar	2009	-	Unit	B	2	Rp 1.600.000,0 0	Rp 3.200.000, 00	-
44	Papan Visual/Papan Nama	-	2012	-	Unit	B	1	Rp 750.000,00	Rp 750.000,0 0	Peralihan dari BPM 2015
45	Papan Visual/Papan Nama	-	2013	-	buah	B	5	Rp 70.000,00	Rp 350.000,0 0	-
46	Papan Visual/Papan Nama	-	2013	-	paket	B	1	Rp 4.000.000,0 0	Rp 4.000.000, 00	-
47	Alat Penghancur Kertas	Secure	2016	-	Unit	B	1	Rp 3.250.000,0 0	Rp 3.250.000, 00	-
48	White Board	Sakura	2007	-	Unit	B	2	Rp 1.318.590,0 0	Rp 2.637.180, 00	-
49	White Board	Sakura	2008	-	Unit	B	3	Rp 731.403,00	Rp 2.194.209, 00	-
50	White Board	-	2008	-	Unit	B	1	Rp 1.390.500,0 0	Rp 1.390.500, 00	Peralihan dari BPM 2015
51	Alat Kantor Lainnya	-	2013	-	buah	B	1	Rp 170.000,00	Rp 170.000,0 0	-
52	Alat Kantor Lainnya	-	2013	-	roll	B	12	Rp 400.000,00	Rp 4.800.000, 00	-
53	Lemari Kayu	Elite	2008	-	Unit	B	7	Rp 834.300,00	Rp 5.840.100, 00	-
54	Lemari Kayu	Brother	2011	-	Unit	B	2	Rp 3.499.250,0 0	Rp 6.998.500, 00	-
55	Lemari Kayu	-	2012	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,0 0	Rp 2.000.000, 00	Peralihan dari BPM 2015
56	Lemari Kayu	-	2012	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,0 0	Rp 2.000.000, 00	Peralihan dari BPM 2015
57	Meja Kerja Kayu	-	2014	-	Unit	B	4	Rp 600.000,00	Rp 2.400.000, 00	Peralihan dari BPM 2015
58	Kursi Besi/Metal	Brother	2014	-	Unit	B	10	Rp 770.000,00	Rp 7.700.000, 00	-
59	Meja Rapat	Moderat/ besar	2008	510x270x 60	Set	B	1	Rp 1.494.082,9 8	Rp 1.494.082, 98	-
60	Meja Rapat	Glory Import/k ecil	2008	360x150x 74 cm	Unit	B	1	Rp 12.699.900, 00	Rp 12.699.90 0,00	-
61	Meja Rapat	Standart	2009	-	set	B	1	Rp 5.550.000,0 0	Rp 5.550.000, 00	Peralihan dari BPM 2015
62	Meja 1/2 Biro	Glory	2007	122x77x7 4 cm	Unit	B	29	Rp 1.058.400,0 0	Rp 30.693.60 0,00	-
63	Meja 1/2 Biro	Glory	2007	154x77x7 4 cm	Unit	B	1	Rp 1.146.600,0 0	Rp 1.146.600, 00	-
64	Meja 1/2 Biro	Glory	2008	122x70x7 4 cm	Unit	B	5	Rp 880.650,00	Rp 4.403.250, 00	-
65	Meja 1/2 Biro	Orbitren	2008	-	Unit	B	10	Rp 876.015,00	Rp 8.760.150, 00	Peralihan dari BPM 2015
66	Meja 1/2 Biro	Sbitrend	2008	-	Unit	B	3	Rp 1.371.960,0	Rp 4.115.880,	Peralihan dari BPM

								0	00	2015
67	Meja Panjang	Standar kayu	2009	3x0,70	Unit	B	1	Rp 990.000,00	Rp 990.000,00	-
68	Meja Panjang	Fortune	2013	-	Set	B	1	Rp 23.557.500,00	Rp 23.557.500,00	-
69	Kursi Rapat	-	2008	-	Unit	B	54	Rp 185.400,00	Rp 10.011.600,00	-
70	Kursi Rapat	Fortuner	2009	-	Unit	B	9	Rp 497.000,00	Rp 4.473.000,00	Peralihan dari BPM 2015
71	Kursi Putar	Fantoni	2007	-	Unit	B	6	Rp 970.200,00	Rp 5.821.200,00	-
72	Kursi Putar	Junior	2008	-	Unit	B	2	Rp 463.500,00	Rp 927.000,00	-
73	Kursi Putar	-	2014	-	Unit	B	2	Rp 400.000,00	Rp 800.000,00	Peralihan dari BPM 2015
74	Bangku Tunggu	Rakuda	2009	-	Unit	B	4	Rp 2.460.000,00	Rp 9.840.000,00	-
75	Bangku Tunggu	4 dudukan	2016	-	Unit	B	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Hibah dari Dinkes
76	Meja Komputer	Glory/S P-208	2009	-	Unit	B	4	Rp 272.500,00	Rp 1.090.000,00	-
77	Meja Komputer	Aktif /Ct-1209 G	2010	-	Unit	B	2	Rp 1.480.000,00	Rp 2.960.000,00	-
78	Sofa	Golden	2008	-	Unit	B	1	Rp 22.711.500,00	Rp 22.711.500,00	-
79	Sofa	Standart	2009	-	set	B	1	Rp 4.450.000,00	Rp 4.450.000,00	Peralihan dari BPM 2015
80	Sofa	Standar	2014	-	Unit	B	1	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	-
81	Meubeleur lainnya	Standar	2009	-	Unit	B	1	Rp 145.000,00	Rp 145.000,00	-
82	Meubeleur lainnya	-	2016	130X70 CM	Unit	B	1	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Hibah dari Dinkes
83	Mesin Pemotong Rumput	STIHL	2016	-	Unit	B	1	Rp 2.850.000,00	Rp 2.850.000,00	-
84	A.C. Window	Panasonic	2008	-	Unit	B	3	Rp 4.635.000,00	Rp 13.905.000,00	-
85	A.C. Window	Panasonic	2008	-	Unit	B	2	Rp 7.416.000,00	Rp 14.832.000,00	-
86	A.C. Window	Panasonic	2009	-	Unit	B	4	Rp 4.490.000,00	Rp 17.960.000,00	-
87	A.C. Window	Panasonic	2009	-	Unit	B	1	Rp 11.975.000,00	Rp 11.975.000,00	-
88	A.C. Window	Akira	2013	-	Unit	B	1	Rp 13.300.000,00	Rp 13.300.000,00	-
89	Exhause Fan	Panasonic	2009	-	Unit	B	3	Rp 497.500,00	Rp 1.492.500,00	-
90	Kompur Gas (Alat Dapur)	Rinai	2008	-	Unit	B	1	Rp 556.200,00	Rp 556.200,00	-

91	Tabung Gas	Pertamina	2008	-	Unit	B	1	Rp 741.600,00	Rp 741.600,00	-
92	Televisi	Toshiba	2007	-	Unit	B	1	Rp 2.416.680,00	Rp 2.416.680,00	-
93	Televisi	Polytron PLM 40M53	2013	-	inch	B	1	Rp 5.400.000,00	Rp 5.400.000,00	-
94	Wireless	TOA	2012	-	Unit	B	1	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
95	Unit Power Supply	Bravo	2007	-	Unit	B	2	Rp 661.500,00	Rp 1.323.000,00	-
96	Unit Power Supply	Prolink	2008	-	Unit	B	1	Rp 695.250,00	Rp 695.250,00	Peralihan dari BPM 2015
97	Unit Power Supply	Prolink	2009	-	Unit	B	3	Rp 847.500,00	Rp 2.542.500,00	-
98	Unit Power Supply	Bravo 600 PA APC SC 1000 Prolink	2010	-	Unit	B	2	Rp 1.189.750,00	Rp 2.379.500,00	-
99	Stabilisator	Matsui	2007	-	Unit	B	3	Rp 308.700,00	Rp 926.100,00	-
100	Camera Video	Canon Ixxus	2013	-	Unit	B	1	Rp 1.980.000,00	Rp 1.980.000,00	-
101	Camera Video	Infinity/ DV- 3104	2014	-	Unit	B	1	Rp 7.300.000,00	Rp 7.300.000,00	-
102	Camera film	Nikon	2008	-	Unit	B	1	Rp 4.634.073,00	Rp 4.634.073,00	-
103	Camera film	Nikon D 3100	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
104	Tangga Aluminium	Indalex R	2009	-	Unit	B	1	Rp 445.000,00	Rp 445.000,00	-
105	Dispenser	Miyako	2007	-	Unit	B	1	Rp 308.700,00	Rp 308.700,00	-
106	Dispenser	Miyako	2007	-	Unit	B	1	Rp 868.770,00	Rp 868.770,00	-
107	Handy Cam	Sony	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Peralihan dari BPM 2015
108	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	2014	-	Unit	B	1	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	-
109	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	Jupiter	2014	-	Unit	B	8	Rp 150.000,00	Rp 1.200.000,00	-
110	Mini Komputer	Samsung/ Pentium Core Duo	2010	-	Unit	B	1	Rp 14.925.000,00	Rp 14.925.000,00	Peralihan dari BPM 2015
111	P.C Unit	Samsung	2008	-	Unit	B	1	Rp 9.548.100,00	Rp 9.548.100,00	Peralihan dari BPM 2015
112	P.C Unit	Acer	2008	-	Unit	B	5	Rp 8.342.639,50	Rp 41.713.197,50	-
113	P.C Unit	Accer Aspire	2012	-	Unit	B	3	Rp 8.000.000,00	Rp 24.000.000,00	Peralihan dari BPM 2015
114	P.C Unit	HP PRO 3330	2014	-	Unit	B	3	Rp 7.803.125,00	Rp 23.409.375,00	Hibah dari BKPM RI

								0	5,00	
115	P.C Unit	HP + meja + UPS 700 VA	2016	-	Unit	B	4	Rp 9.500.000,0 0	Rp 38.000.00 0,00	-
116	Lap Top	Asus	2012	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,0 0	Rp 7.000.000, 00	Peralihan dari BPM 2015
117	Lap Top	Lenovo EDGE	2013	-	Unit	B	1	Rp 9.980.000,0 0	Rp 9.980.000, 00	-
118	Lap Top	ASUS A455L	2015	-	Unit	B	2	Rp 7.283.333,3 3	Rp 14.566.66 6,67	-
119	Lap Top	Asus	2016	-	Unit	B	2	Rp 8.000.000,0 0	Rp 16.000.00 0,00	-
120	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP	2008	-	Unit	B	2	Rp 2.776.365,0 0	Rp 5.552.730, 00	-
121	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer dotmatri k, Epson LQ 2190	2016	-	Unit	B	1	Rp 8.400.000,0 0	Rp 8.400.000, 00	-
122	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Laserjet, HP Pro CP1025	2016	-	Unit	B	2	Rp 3.500.000,0 0	Rp 7.000.000, 00	-
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Infus, Epson L120	2016	-	Unit	B	2	Rp 2.150.000,0 0	Rp 4.300.000, 00	-
124	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Canon Mx497	2016	-	Unit	B	1	Rp 2.150.000,0 0	Rp 2.150.000, 00	-
125	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP LASERJ ET M1132	2014	-	Unit	B	2	Rp 2.124.320,0 0	Rp 4.248.640, 00	Hibah dari BKPM RI
126	Peralatan Personal Komputer lainnya	Rex patch cord	2014	-	Unit	B	1	Rp 39.570,00	Rp 39.570,00	Hibah dari BKPM RI
127	Server	IBM X3	2013	-	Unit	B	1	Rp 30.200.000, 00	Rp 30.200.00 0,00	-
128	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Fantoni F-4000	2007	-	Unit	B	1	Rp 2.116.800,0 0	Rp 2.116.800, 00	-
129	Buffet Kayu	-	2014	-	Unit	B	4	Rp 3.050.000,0 0	Rp 12.200.00 0,00	Peralihan dari BPM 2015
130	Layar Film/Projector	Infocus	2010	-	Unit	B	1	Rp 9.485.000,0 0	Rp 9.485.000, 00	Peralihan dari BPM 2015
131	Rollmeter	-	2007	-	Unit	B	1	Rp 250.000,00	Rp 250.000,0 0	-
132	Noise Level Meter	Extech	2013	-	Unit	B	2	Rp 6.975.000,0 0	Rp 13.950.00 0,00	-
133	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	2008	689,6 M2	Unit	B	1	Rp 1.610.400.0 00,00	Rp 1.610.400. 000,00	Penilaian Aset 2013
134	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	2008	19,25 M2	Unit	B	1	Rp 30.266.400, 00	Rp 30.266.40 0,00	Penilaian Aset 2013
135	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	-	2008	9,75 M2	Unit	B	1	Rp 26.630.000, 00	Rp 26.630.00 0,00	Penilaian Aset 2013
136	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	2008	667 M2	Unit	B	1	Rp 81.356.400, 00	Rp 81.356.40 0,00	Penilaian Aset 2013

137	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	2008	45 M2	Unit	B	1	Rp 16.950.000,00	Rp 16.950.000,00	Penilaian Aset 2013
138	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	2009	174 M2	Unit	B	1	Rp 184.769.000,00	Rp 184.769.000,00	Penilaian Aset 2013
139	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	-	2016	-	Unit	B	1	Rp 68.926.000,00	Rp 68.926.000,00	Hibah dari Dinkes
140	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	-	2013	30 M	Unit	B	1	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	-
141	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi)	-	2009	40 M2	Unit	B	1	Rp 53.379.924,00	Rp 53.379.924,00	-
142	Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi)	-	2009	40 M2	Unit	B	1	Rp 13.729.176,00	Rp 13.729.176,00	-
143	Bangunan Penampung Air Baku	-	2014	-	Unit	B	1	Rp 25.200.000,00	Rp 25.200.000,00	-
144	Instalasi Penangkal Petir Manual	-	2013	-	Unit	B	1	Rp 24.800.000,00	Rp 24.800.000,00	-
145	Jaringan Telepon Datas Tanah Kapasitas Kecil	-	2008	-	Unit	B	2	Rp 1.854.000,00	Rp 3.708.000,00	-
146	Rak Kayu	Orbitrend	2008	-	Unit	B	1	Rp 1.826.190,00	Rp 1.826.190,00	Peralihan dari Perindagkop
147	Filing Cabinet Besi	Brother	2007	-	Unit	B	4	Rp 1.300.950,00	Rp 5.203.800,00	Peralihan dari Perindagkop
148	Filing Cabinet Besi	Brother	2008	-	Unit	B	4	Rp 1.369.642,50	Rp 5.478.570,00	Peralihan dari Perindagkop
149	Lemari Kayu	Brother	2011	-	Buah	B	1	Rp 3.172.500,00	Rp 3.172.500,00	Peralihan dari Perindagkop
150	P.C Unit	Samsung	2008	-	Unit	B	1	Rp 9.587.497,50	Rp 9.587.497,50	Peralihan dari Perindagkop
151	P.C Unit	Samsung	2011	-	Unit	B	1	Rp 10.400.000,00	Rp 10.400.000,00	Peralihan dari Perindagkop
152	Lap Top	Acer	2014	-	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Peralihan dari Perindagkop
153	Buffet Kayu	Brother	2003	-	Unit	B	1	Rp 1.940.400,00	Rp 1.940.400,00	Peralihan dari Perindagkop
154	P.C Unit	Lenovo	2016	-	Unit	B	1	Rp 6.700.000,00	Rp 6.700.000,00	Peralihan dari Perindagkop
155	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2016	-	Unit	B	1	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Peralihan dari Perindagkop
156	P.C Unit	HP	2019	-	Unit	B	6	Rp 9.362.500,00	Rp 56.175.000,00	Pengadaan 2019

157	Lap Top	Lenovo Yoga	2019	-	Unit	B	2	Rp 10.737.500,00	Rp 21.475.000,00	Pengadaan 2019
158	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP Laser Jet Pro MFP M227 sdn [G3Q74 A]	2019	-	Unit	B	2	Rp 4.396.500,00	Rp 8.793.000,00	Pengadaan 2019
159	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3110	2019	-	Unit	B	8	Rp 2.500.000,00	Rp 20.000.000,00	Pengadaan 2019
160	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Plustek Mobile Office S410	2019	-	Unit	B	2	Rp 2.296.500,00	Rp 4.593.000,00	Pengadaan 2019
161	Unit Power Supply	Fsp UPS EP FP600	2019	-	Unit	B	7	Rp 797.500,00	Rp 5.582.500,00	Pengadaan 2019
162	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	Vikacare	2019	-	Unit	B	1	Rp 1.715.000,00	Rp 1.715.000,00	Pengadaan 2019
163	Tensimeter	Omron	2019	-	Unit	B	1	Rp 473.000,00	Rp 473.000,00	Peralihan dari Dinkes 2019
164	Papan Visual/Papan Nama	-	2019	-	Unit	B	1	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Pengadaan 2019
165	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	-	2019	-	Unit	B	1	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Pengadaan 2019
166	Rollmeter	Rhino	2019	-	Unit	B	2	Rp 125.000,00	Rp 250.000,00	Pengadaan 2019
167	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Sanfix	2019	-	Unit	B	1	Rp 6.250.000,00	Rp 6.250.000,00	Pengadaan 2019
168	A.C. Window	Polytron	2020	-	Unit	B	1	Rp 11.600.000,00	Rp 11.600.000,00	Belanja Modal APBD 2020
169	Air Conditioning (AC)	Sharp	2020	-	Unit	B	2	Rp 5.650.000,00	Rp 11.300.000,00	Belanja Modal APBD 2020
170	Termometer Gun	Coolpad	2020	-	Unit	B	1	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	peralihan aset dari dinkes
171	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	Polar	2020	-	Unit	B	1	Rp 874.500,00	Rp 874.500,00	peralihan aset dari dinkes
172	Layar Film/Projector	Epson	2020	-	Unit	B	1	Rp 9.600.000,00	Rp 9.600.000,00	Belanja Modal APBD 2020
173	Meja 1/2 Biro	Modesty /GST-1080	2020	-	Unit	B	10	Rp 1.850.000,00	Rp 18.500.000,00	Belanja Modal APBD 2020
174	Kursi Putar	type OC-079	2020	-	Unit	B	10	Rp 825.000,00	Rp 8.250.000,00	Belanja Modal APBD 2020
175	Termometer Gun	Coolpad	2021	-	Unit	B	1	Rp 366.666,00	Rp 366.666,00	peralihan aset dari BPBD
176	AC Split	Gree GWC-18M005 2 PK	2021	-	Unit	B	1	Rp 7.074.000,00	Rp 7.074.000,00	Pengadaan 2021
177	Hardisk Eksternal	Hardisk Kapasitas 1 TB	2021	-	Unit	B	4	Rp 1.050.000,00	Rp 4.200.000,00	Pengadaan 2021

178	P.C Unit	Lenovo	2022	-	Unit	B	2	12.350.000,00	Rp 24.700.000,00	Pengadaan 2022
179	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L121 Inkjet	2022	-	Unit	B	2	2.400.000,00	Rp 4.800.000,00	Pengadaan 2022
180	P.C Unit	Lenovo	2022	-	Unit	B	3	9.899.979,00	29.699.937,00	Pengadaan 2022
181	Laptop	Lenovo	2022	-	Unit	B	2	23.115.750,00	46.231.500,00	Pengadaan 2022
182	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3210	2022	-	Unit	B	3	4.440.000,00	13.320.000,00	Pengadaan 2022
183	Mesin Scanner	Canon	2022	-	Unit	B	3	987.456,00	2.962.368,00	Pengadaan 2022
184	AC Split	Panasonic	2022	-	Unit	B	6	5.200.000,00	31.200.000,00	Pengadaan 2022
185	Cool Box	Kapasitas 100 Liter	2022	-	Unit	B	1	1.200.000,00	1.200.000,00	Pengadaan 2022
186	Exhaust Fan	Panasonic	2022	-	Unit	B	2	834.000,00	1.668.000,00	Pengadaan 2022
187	Kipas Angin	Celling	2022	-	Unit	B	2	311.000,00	622.000,00	Pengadaan 2022
188	Alat Pemadam Kebakaran (Alat Pembantu Kebakaran)	Tabung Apar 6 kg Powder	2022	-	Unit	B	3	620.000,00	1.860.000,00	Pengadaan 2022
189	P.C Unit (Komputer)	ACER C22	2021	-	Unit	B	1	12.430.000,00	12.430.000,00	Hibah dari BKPM RI 2022
190	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON PIXMA G3010	2021	-	Unit	B	1	2.985.400,00	2.985.400,00	Hibah dari BKPM RI 2022
191	Modem Wifi	ADVAN	2021	-	Unit	B	1	1.109.900,00	1.109.900,00	Hibah dari BKPM RI 2022
192	Mesin Antrian (Mesin Hitung/Mesin Jumlah Lainnya)	ONESIA	2022	-	Unit	B	1	62.160.000,00	62.160.000,00	Pengadaan 2022
193	Tanah Eks Pusat Kesehatan Masyarakat Sungailiat	-	1983	1508 M2	Unit	B	1	699.712.000,00	699.712.000,00	Peralihan dari DINKES 2022
194	Pelayanan Puskesmas Sungailiat	-	2007	702 M2	Unit	B	1	1.564.334.935,80	1.564.334.935,80	Peralihan dari DINKES 2022
195	Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium	-	2014	-	Unit	B	1	1.057.181.000,00	1.057.181.000,00	Peralihan dari DINKES 2022

196	Pagar Gedung Puskesmas	-	2000	29 M2	Unit	B	1	22.153.064,20	22.153.064,20	Peralihan dari DINKES 2022
197	Perkerasan Halaman Puskesmas	-	2000	454 M2	Unit	B	1	36.748.800,00	36.748.800,00	Peralihan dari DINKES 2022
198	Selasar	-	2000	252 M2	Unit	B	1	399.168.000,00	399.168.000,00	Peralihan dari DINKES 2022
199	Mesin Genset	-	2012	-	Unit	KB	1	168.590.000,00	168.590.000,00	Peralihan dari BPPKAD 2022
200	Neon Box 3x1 Meter (Papan Nama Instansi)	-	2022	3x1 Meter	Unit	B	1	5.000.000,00	5.000.000,00	Peralihan dari BPPKAD 2023 (Hibah dari PT. Asia Surya Perkasa)
201	P.C Unit (Komputer)	Lenovo	2023	-	Unit	B	15	9.550.000,00	143.250.000,00	Pengadaan 2023
202	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Laserjet Pro MFP M428fdn	2023	-	Unit	B	1	9.840.000,00	9.840.000,00	Pengadaan 2023
203	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon G2010	2023	-	Unit	B	14	3.080.000,00	43.120.000,00	Pengadaan 2023
204	Mesin Fotocopi	Canon	2023	-	Unit	B	1	44.000.000,00	44.000.000,00	Pengadaan 2023
205	Laptop	Lenovo	2023	-	Unit	B	2	12.650.000,00	25.300.000,00	Pengadaan 2023
206	Kulkas (Lemari Es)	LG	2023	-	Unit	B	1	2.950.000,00	2.950.000,00	Pengadaan 2023
207	Water Dispenser (Dispenser)	Polytron	2023	-	Unit	B	4	3.000.000,00	12.000.000,00	Pengadaan 2023
208	Televisi	Sharp, LED TV Ukuran 40"	2023	-	Unit	B	1	4.750.000,00	4.750.000,00	Pengadaan 2023
209	Alat Pemadam Kebakaran (Alat Pembantu Kebakaran) /Alat Pemadam (Portable)	Tabung Apar	2023	-	Unit	B	5	832.500,00	4.162.500,00	Pengadaan 2023
210	Running Teks	100 x 200 cm, Tulisan /Teks berjalan LED	2023	-	Unit	B	1	3.300.000,00	3.300.000,00	Pengadaan 2023
211	Kursi Front Office (Pelayanan)/ Mebeleur Lainnya	Indhaci seri javico IV COT	2023	-	Unit	B	1	525.000,00	525.000,00	Pengadaan 2023
212	Kursi Kerja (Kursi Putar)	Sandaran Berlapis Jaring Nylon	2023	-	Unit	B	1	1.195.000,00	1.195.000,00	Pengadaan 2023

213	Kursi Kerja (Kursi Biasa)	Futura	2023	-	Unit	B	3	670.000,00	2.010.000,00	Pengadaan 2023
214	Kursi Rapat	Brother (Warna Biru)	2023	-	Unit	B	24	500.000,00	12.000.000,00	Pengadaan 2023
215	Meja Rapat	400 cm x 120 cm x 75 cm	2023	-	Unit	B	1	14.000.000,00	14.000.000,00	Pengadaan 2023
216	Gorden (Gordyin/Kray)	Kain Luar Bahan Blackout Desain dan Kain Dalam Berbaha n Vitrac e kain Voice	2023	-	Set	B	2	4.500.000,00	9.000.000,00	Pengadaan 2023
JUMLAH							586		8.779.402.572,65	

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

B. ASPEK STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka aspek strategis dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus proses kegiatan dalam Tahun 2023 adalah :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan Kegiatan:
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Potensi dan Peluang Investasi (APBD).
  - Kegiatan Pemeliharaan dan Updating Database Website DINPMP2KUKM (APBD).
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik, dengan Kegiatan:
  - Kegiatan Peningkatan Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal, Bimbingan Teknis Penanaman modal dan Pengawasan Penanaman Modal.
  - Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pelayanan Aplikasi PATEN di Kecamatan (APBD).
  - Kegiatan Pemutihan Perizinan (APBD).

Jumlah sumber daya alam yang dipromosikan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka ada 6 (enam) sektor, yaitu:

1. Sektor Pariwisata.
2. Sektor Pertambangan dan Energi.
3. Sektor Kelautan dan Perikanan.
4. Sektor Industri (Industri Pengolahan Lada, Industri Pengolahan Karet, Industri Pengolahan Sawit, Industri Pengolahan Balok Timah dan Industri Pengolahan Kaolin).
5. Sektor Pertanian dan Peternakan.
6. Sektor Kehutanan dan Perkebunan.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023. Hal ini berguna mengetahui tingkat pencapaian target kinerja yang lebih terukur serta keselarasan dengan Grand Strategy dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah sebagai bahan dan dokumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) OPD Tahun 2020 serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 agar tercipta pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab sehingga dapat memberikan informasi tentang kinerja yang dicapai oleh OPD.

LKIP Kabupaten Bangka ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023.

#### **D. LANDASAN HUKUM**

LAKIN Kabupaten Bangka ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

***E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIN TAHUN 2023***

Adapun sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2023 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. MATRIK PENGUKURAN KINERJA
2. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinpmp2kukm Nomor 188.4/018/DINPMP2KUKM Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban BUPATI BANGKA terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai tugas *Membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. *Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, investasi, promosi dan pelayanan perizinan dan non perizinan.*
2. *Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal, investasi, promosi dan pelayanan perizinan dan non perizinan.*
3. *Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, investasi, promosi dan pelayanan perizinan dan non perizinan.*
4. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.*

### **A. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten 2019-2023 adalah :

Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat  
2. Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat;  
2. Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal;  
3. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  
4. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

### **B. STRATEGI, KEBIJAKAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN CAPAIAN PROGRAM**

Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah :

Strategi : 1. Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik;  
2. Penguatan Lembaga Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah serta Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat

Kebijakan : 1. Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online dan Menyederhanakan Jalur Birokrasi Perizinan dengan Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);  
2. Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM serta Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi.

Penetapan Indikator Kinerja Sasaran dan Program Pembangunan Daerah serta keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan sesuai SOP;
2. Persentase Peningkatan Investasi Daerah;
3. Nilai AKIP;
4. Persentase Koperasi Aktif/Sehat;
5. Persentase UMKM yang naik kelas.

Program Pembangunan Daerah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik;
10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
11. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Capaian Program :

1. Jenis dan Jumlah Pelayanan Publik;
2. Jumlah Kerjasama Kemitraan Usaha Antara Pemda dan Pihak Kedua;
3. Jumlah Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk dapat membandingkan keterkaitan RPJMD dengan Renstra OPD pada dilihat pada tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 berikut ini :

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : BANGKA SETARA					
Misi I Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan BerbasisTeknologi Informasi					
TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Tujuan :</i> Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	<i>Indikator Tujuan :</i> Indeks Reformasi Birokrasi	<i>Sasaran :</i> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	<i>Indikator Sasaran :</i> Indeks Kepuasan Masyarakat	<i>Strategi :</i> 1.Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik 2.Memberikan Akses dan Kemudahan Investasi Daerah 3..Penguatan Regulasi dan Sistem Pasar 4.. Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat	<i>Kebijakan :</i> 1.Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online. 2. Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3.Memberikan Informasi dan Prospek Potensi Investasi Daerah 4.Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM 5. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi

Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : BANGKA SETARA					
Misi IV Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional					
TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Tujuan :</i> Meningkatkan Pembangunan Sektor Pariwisata Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	<i>Indikator Tujuan :</i> Spending Of Money	<i>Sasaran :</i> Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata	<i>Indikator Sasaran :</i> Persentase Kontribusi Investasi Bidang Pariwisata Terhadap Total Investasi Daerah	<i>Strategi :</i> 1.Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik 2.Memberikan Akses dan Kemudahan Investasi Daerah 3..Penguatan Regulasi dan SIstem Pasar 4.. Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat	<i>Kebijakan :</i> 1.Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online. 2. Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3.Memberikan Informasi dan Prospek Potensi Investasi Daerah 4.Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM 5. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi

Tabel 2.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : BANGKA SETARA					
Misi V Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan					
TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>Tujuan :</i> Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	<i>Indikator Tujuan :</i> Laju Pertumbuhan Ekonomi	<i>Sasaran :</i> Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	<i>Indikator Sasaran :</i> Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	<i>Strategi :</i> 1.Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik 2.Memberikan Akses dan Kemudahan Investasi Daerah 3..Penguatan Regulasi dan Sistem Pasar 4.. Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat	<i>Kebijakan :</i> 1.Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online. 2. Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3.Memberikan Informasi dan Prospek Potensi Investasi Daerah 4.Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM 5. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi

Berdasarkan Rencana Strategis OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka seperti tertuang pada tabel 2.1 dan keterkaitan RPJMD Kabupaten Bangka 2019 - 2023 yang tertuang pada tabel 2.2 bahwa program yang menjadi acuan pada Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah, Kebijakan Umum adalah Membangun jaringan komunikasi perizinan investasi secara online adapun program-program acuan tersebut adalah :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
  - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik.
  - 3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
  - 4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - 5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Untuk melaksanakan program-program tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan OPD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**C. OUTPUT/OUTCOME HASIL TAHUN 2022 YANG INGIN DICAPAI MENGACU KEPADA PERJANJIAN KINERJA YANG SUDAH DITETAPKAN DIAWAL TAHUN ANGGARAN 2022**

Ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka melalui Kegiatan Tahun Anggaran 2023, yaitu :

- 1) Tertibnya Perizinan yang dikeluarkan dan Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional Perizinan.
- 2) Tertibnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik atau per semester oleh perusahaan PMDN/PMA melalui Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 3) Meningkatnya jumlah koperasi dan minat para Usaha Kecil Menengah dalam mendirikan koperasi melalui kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.
- 4) Meningkatnya jumlah produk Usaha Kecil dan Menengah secara bertahap guna pengembangan kemampuan usaha kreatif masyarakat melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Berikut ini merupakan gambaran tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah pelayanan yang dilakukan pada OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka :

**Tabel 2.4**

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	100.00	100	100.00	100.00	100.00
		Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	33.33	34.00	35.00	35.00	35.00
2	Meningkatkan Akuntabilitas	Meningkatnya Akuntabilitas	Predikat (Nilai) SAKIP	B	BB	BB	BB	A

	DINPMP2KUKM	DINPMP2KUKM	Perangkat Daerah					
		Meningkatnya kualitas layanan DINPMP2KUKM	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
3	Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00
			Persentase UMKM Yang Naik Kelas	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00

**D. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Bangka telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan BUPATI BANGKA Nomor : 188.4/016.1/DINPMP2KUKM Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Bangka dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019 - 2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha**  
**Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	%	-	(Jumlah Perizinain Yang Diselesaikan/Jumlah Perizinan Yang Didaftarkan )x 100 %	-
2	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	-	(Jumlah Investor Yang Menanamkan Modal Tahun Sekarang)- (Jumlah Investor Yang Menanamkan Modal Tahun Sebelumnya)/((Jumlah Investor Yang Menanamkan Modal Tahun Sebelumnya)x100%	-
3	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	%	-	(Jumlah Koperasi Sehat)/(Jumlah Koperasi Yang Terdaftar) x 100 %	-
		Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	-	(Jumlah UMKM Yang Naik Kelas)/(Jumlah UMKM Yang Terdaftar) x 100 %	-

**E. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA OPD 2023**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2019-2023, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang sudah disusun dan ditandatangani oleh Kepala OPD bersama-sama dengan Bupati Bangka dalam perjalanannya

mengalami perubahan dan telah dilakukan revisi untuk itu berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2023 Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka telah menetapkan sasaran serta indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja SKPD  
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/ Non Perizinan Yang Tepat Waktu Sesuai SOP	100%	100%
		Persentase Peningkatan Investasi Daerah	33,33%	33,70%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai AKIP	B	BB
3	Meningkatnya Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang berklasifikasi A	76,10%	76,10%
		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	66,67%	66,67%
4	Meningkatnya Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan Teknologi Informasi	Persediaan ketersediaan Informasi Online dan Bahan Publikasi ke Publik	2 aplikasi	2 aplikasi
No	Program	Anggaran	Keterangan	
1	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 9.700.000,00	APBD	
2	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 0	APBD	
3	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Rp. 222.476.500,00	APBD + DAK	
4	Pemberdayaan UMKM	Rp. 8.455.000,00	APBD	
5	Pengembangan UMKM	Rp. 284.316.000,00	APBD + DAK	
6	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.388.608.591,00	APBD	
7	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 87.249.458,00	APBD	
8	Promosi Penanaman Modal	Rp. 63.569.920,00	APBD	
9	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 653.611.938,00	APBD	
10	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 464.444.000,00	APBD + DAK	

11	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 0	APBD
Jumlah		Rp.8.182.431.407,00	

Besaran anggaran dalam Formulir Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertera diatas merupakan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Guna penyelarasan terhadap hasil review RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 serta adanya Perubahan alokasi anggaran program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023, maka perlu dilakukan revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana huruf E dijelaskan : Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	100.00
2	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	33.33
3	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUKM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	B
4	Meningkatnya Koperasi dan	Persentase Peningkatan Jumlah	76,10

	Usaha Mikro yang berdaya saing	Koperasi yang berklasifikasi A	
		Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	66,7
5	Meningkatnya Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan Teknologi Informasi	Persediaan ketersediaan Informasi Online dan Bahan Publikasi ke Publik	2 aplikasi

Hasil reuiu pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reuiu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2023.

Beberapa catatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reuiu Rencana strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka antara lain :

Berdasarkan hasil reuiu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2023 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reuiu**  
**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha**  
**Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka**

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	%	100.00	100	100.00	100.00	100.00
		Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	33.33	34.00	35.00	35.00	35.00
2	Meningkatkan Akuntabilitas DINPMP2KUK	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUK	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat	Kategori	B	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya kualitas	Tingkat Kepuasan	Nilai	BAIK	BAIK		SANGAT BAIK	SANGAT BAIK

		layanan DINPMP2KUK M	Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariata n						
3	Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaa n Koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Persentase Koperasi Aktif	%	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00
			Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
4	Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	%	-	(Jumlah Koperasi Sehat)/(Jumla h Koperasi Yang Terdaftar) x 100 %		-		
		Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	-	(Jumlah UMKM Yang Naik Kelas)/(Jumla h UMKM Yang Terdaftar) x 100 %		-		

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (inputs), proses (process), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, rupiah, bulan, hari dan sebagainya.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu juga metode yang dilakukan adalah membandingkan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Pengukuran prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$\begin{array}{l} \% \text{ Pencapaian} \\ \text{Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$
--

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

% Pencapaian  
Kinerja

=

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Rencana

x 100 %

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	> 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	70 < x < 85	Baik / Berhasil
3	55 < x < 70	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Sumber : Joko Widodo, 2001: *Good Governance*

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 3 (tiga) sasaran utama yang mencakup 7 (tujuh) indikator kinerja setingkat *outcome* diperoleh hasil bahwa 4 (empat) indikator masuk dalam kategori **sangat baik/sangat berhasil** dengan nilai capaian diatas 85 %, 1 (satu) indikator dalam kategori **baik/berhasil** dengan nilai capaian antara 70 s/d 85 % dan 1 (satu) indikator masuk dalam kategori **sangat kurang/tidak berhasil** dengan nilai capaian dibawah 55 %.

Indikator sasaran yang dipaparkan pada tabel berikut merupakan keseluruhan indikator pencapaian *Kinerja Sasaran* yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Indikator yang belum ditargetkan pencapaiannya atau belum diukur tingkat capaiannya yang ditandai dengan tanda *strip* ( - ) merupakan indikator-indikator yang belum diprioritaskan pada tahun 2023, oleh karena itu belum dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang indikator dimaksud, sebagaimana di rinci dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 merupakan gambaran Kinerja Tahun Ketiga untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2023. Rumusan Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil review terhadap Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :  
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat.

a. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini  
*Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:*

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Penyelesaian Perizinan /Non Perizinan Sesuai SOP	%	100	100	100	Sangat Baik/ Sangat Berhasil
2.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	33,33	33,70	100	Sangat Baik/ Sangat Berhasil
	Rata-Rata Capaian				<b>100</b>	Sangat Baik/ Sangat Berhasil

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran ”*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat*” secara rata-rata sebesar 100 % pembulatan dari 697.67 % berada pada kategori Sangat Baik / Sangat Berhasil. Dari empat indikator yang diukur, dua indikator yang tingkat capaiannya dibawah 100 %, serta ada satu indikator yang melebihi 100 %. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 2019 sebesar 100 %.

b. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan capaian pada tahun sebelumnya, realisasi dan target jangka menengah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D 2019 TERHADAP 2020 (%)
1.	Persentase Penyelesaian Perizinan /Non Perizinan Sesuai SOP	%	97,47	65,00	100	150
4.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	33,33	33,70	35,00	101,11

c. Analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan urusan Penanaman Modal untuk Indikator :

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu.

Hambatan dalam pencapaian sasaran :

- a. Pengurusan izin yang dilakukan oleh pihak pengusaha selalu terlambat dalam penyelesaian dikarenakan tidak lengkapnya berkas yang dilampirkan sehingga harus dikembalikan untuk dilengkapi.
- b. Adanya kelesuan ekonomi karena fluktuasi yang tidak menentu dari pasar, sehingga banyak usaha-usaha yang tidak memperpanjang izin atau vakum sementara.
- c. Tidak mencukupi anggaran survey lapangan yang dilakukan oleh tim teknis sehingga selalu menghambat penyelesaian izin yang tepat waktu.
- d. Sumber Daya Manajemen Aparatur yang terbatas dan belum memiliki kriteria (Tingkat Dasar, Lanjutan dan Sektoral).
- e. Perusahaan yang berinvestasi kurang sadar dengan kewajiban untuk melaporkan kemajuan realisasi investasi baik dilakukan secara online maupun offline secara berkala setiap tiga bulan sekali selama masa pembangunan dan setiap enam bulan sekali setiap tahunnya pada masa investasi berjalan/berproduksi.
- f. Adanya sistem baru yang digunakan dalam proses penyelesaian perizinan.

Strategi/Solusi pemecahan masalah :

- Memberikan pemahaman kepada pihak pengusaha yang akan mengurus izin tentang kelengkapan dokumen yang diperlukan. Sehingga tidak menghambat dalam proses penyelesaian perizinan.
- Menyediakan anggaran yang memadai dalam memperlancar survey yang ada dilapangan sehingga tidak menghambat dalam penyelesaian proses perizinan.
- Menyediakan anggaran pelatihan yang dikhususkan dalam meningkatkan kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal dan Perizinan.
- Memberikan pemahaman agar setiap perusahaan yang berinvestasi selalu mentaati aturan yang sudah disepakati untuk selalu menyampaikan LKMP tepat waktu.
- Memberikan pemahaman kepada masyakat dan petugas yang melayani perizinan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program yaitu : *Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.*

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan laporan realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja diketahui bahwa rata-rata realisasi keuangan mencapai 95,38 persen, hal ini dipandang cukup efisien dalam penggunaan sumber daya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pencapaian kinerja sasaran ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat” untuk mewujudkan kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat ditunjang dengan *Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik dengan 3 (Tiga) kegiatan dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan 3 (Tiga) kegiatan.*

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

**Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik**

Kegiatan								
Uraian		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Fisik %
1		2		3	4	5	6	7
1	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah	Input	Dana Tersedia	Rupiah	653.611.938,00	598.901.978,00	92,33	100
		Output	Jumlah Dokumen Perizinan Usaha Yang terselesaikan	Paket	8	8	100	
		Outcome	Kelengkapan Dokumen Permohonan Perizinan Usaha dan Umum	Paket	8	8	100	
		Input	Dana	Rupiah	653.611.938,00	598.901.978,00	92,33	100

2	Penunjang Implementasi Sistem Aplikasi Perizinan	Output	Aplikasi Yang Berhasil diupgrade	Paket	1	1	100	100
		Outcome	Terlaksananya a Pelayanan Perizinan	Paket	1	1	100	
	JUMLAH				653.611.938,00	598.901.978,00		

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan								
Uraian		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Fisik %
1		2		3	4	5	6	
1.	Penyusunan Profil Potensi dan Peluang Investasi	Input	Dana Tersedia	Rupiah	0	0	0	100
		Output	Dokumen Potensi dan Peluang Investasi	Dokumen Buku	1 10	1 10	100 100	
		Outcome	Terlaksananya Penyusunan Dokumen dan Promosi Potensi Peluang Investasi	Dokumen Buku	1 10	1 10	100 100	
2.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Input	Dana Tersedia	Rupiah	464.444.000	410.101.503	88,30	100
		Output	Data Realisasi Investasi	Dokumen Buku	4 40	4 40 29	100 100 100	
		Outcome	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Realisasi Investasi	Dokumen Buku	4 40	4 40	100 100	
	JUMLAH				464.444.000	410.101.503	88,30	

Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2020

TAHUN	TARGET BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI SASARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)	EFISIENSI (%)
2023	8.182.431.407	7.381.854.429	90,22	4,62

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

a. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

N O	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
1.	Persentase Koperasi Aktif/Sehat	%	76,00	76,00	100	Baik/ Berhasil
2.	Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	66,7	66,7	100	Berhasil
	Rata-Rata Capaian				100	Berhasil

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah" secara rata-rata sebesar 100 % berada pada kategori Sangat Kurang / Tidak Berhasil. Dari dua indikator yang diukur, kedua indikator tersebut tingkat capaiannya dibawah 100 %. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 2023 sebesar 100 %.

b. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP 2023 (%)
1.	Persentase Koperasi Aktif/Sehat	%	64,88	86,00	88.00	75
2.	Persentase UMKM Yang Naik Kelas	%	5,00	5,00	5.00	100

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka capaian masing-masing indikator yang menggambarkan

kinerja sasaran *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu.

Hambatan dalam pencapaian sasaran :

- a. Kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi yang masih berkreteria aktif dan sehat hal ini dikarenakan tersebarnya koperasi-koperasi tersebut di 8 (delapan) kecamatan.
- b. Dukungan anggaran yang tidak memadai untuk melakukan pembinaan koperasi dilapangan.
- c. Usaha Kecil Menengah yang ada banyak yang tidak memiliki izin usaha yang di persyaratkan sehingga tidak terdaftar di data Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ketika akan dilakukan verifikasi untuk melakukan peningkatan status usaha (Mikro, Kecil dan Menengah maupun Besar). Kurangnya anggaran dalam melakukan verifikasi data ke lapangan terhadap usaha-usaha yang ada.

Strategi/Solusi pemecahan masalah :

- Menyediakan anggaran yang memadai karena kekurangan anggaran yang ada merupakan hal penentu dalam menjaga agar koperasi tetap aktif dan sehat ini dilakukan dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang tersebar tersebut.
- Menyediakan anggaran yang memadai dalam memperlancar proses verifikasi data usaha kecil dan menengah.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 (Dua) program yaitu : *Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.*

c. *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Berdasarkan laporan realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja diketahui bahwa rata-rata realisasi keuangan mencapai 99.19 persen, hal ini dipandang cukup efisien dalam penggunaan sumber daya.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).*

Pencapaian kinerja sasaran " *Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah*" untuk mewujudkan kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah ditunjang dengan, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan 1 (satu) kegiatan dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan 2 (Dua) kegiatan.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kegiatan								
Uraian		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Fisi k %
1		2		3	4	5	6	7
1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Input	Dana Tersedia	Rupiah	9.700.000,00	9.700.000,00	100	10 0
		Output	- Laporan Monitoring dan Evaluasi Usaha Kecil Menengah - Jumlah UMKM Yang Berbadan	Buku	8	8	100	
				UMKM	100	100	100	
		Outcome	Meningkatnya UMKM Yang Berbadan Hukum	UMKM	500	500	100	
2	Sertifikat Halal dan Produk UMKM	Input	Dana Tersedia	Rupiah	506.792.500,00	482.472.929, 00	92,5 2	
		Output	Jumlah UMKM yang bersertifikat	UMKM	35	35		
		Outcome	Meningkatnya UMKM	UMKM	35	35		
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin bagi UMKM	Input	Dana Tersedia	Rupiah	2.389.200.000, 00	1.999.773.84 0,00	83,7 0	
		Output	Jumlah UMKM	UMKM	35	35		
		Outcome	Kualitas UMKM	UMKM	35	35		
	JUMLAH					2.387.735.84 0,00	85,0 3	

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Kegiatan								
Uraian		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Fisi k %
1		2		3	4	5	6	7
1.	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Input	Dana Tersedia	Rupiah	0	0	0	100
		Output	- Laporan Hasil Penilaian	Buku	5	5	100	
			- Jumlah Koperasi Yang Melaksanakan RAT	Unit	205	205	205	
			- USP/KSP Yang Kriteria Sehat	Unit	50	50	50	
2.	Pendampingan Rapat Anggota Tahunan Koperasi	Outcom e	Meningkatnya Koperasi Yang Melaksanakan RAT	Unit	205	205	100	100
		Input	Dana Tersedia	Rupiah	9.700.000,00	9.250.000,00	95,36	
		Output	Laporan Pelaksanaan RAT	Buku	8	8	100	
		Outcom e	Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan RAT	Unit	100	100	100	
3.	Pelatihan Pengawasan Internal Koperasi dan Badan Pengawas	Input	Dana Tersedia	Rupiah	222.476.500,00	216.116.081,00	97,14	100
		Output	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Koperasi	Koperasi	35	35	35	

		Outcom e	Meningkatnya Kualitas SDM Badan Pengawas	%	100	100	100	
	<b>JUMLAH</b>						<b>92,62</b>	

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

e. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

N O	INDIKATOR SASARAN	SATUA N	TARGE T	REALIS ASI	% CAPAIA N	KRITERIA
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang berklasifikasi A	%	76,00	76,00	100	Baik/ Berhasil
2.	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	%	66,7	66,7	100	Berhasil
	Rata-Rata Capaian				<b>100</b>	Berhasil

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah" secara rata-rata sebesar 100 % berada pada kategori Sangat Kurang / Tidak Berhasil. Dari dua indikator yang diukur, kedua indikator tersebut tingkat capaiannya dibawah 100 %. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 2023 sebesar 100 %.

- f. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D 2022 TERHADAP 2023 (%)
1.	Persentase Peningkatan Jumlah Koperasi yang berklasifikasi A	%	76,00	76,00	76,00	75
2.	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	%	66,7	66,7	66,7	100

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka capaian masing-masing indikator yang menggambarkan kinerja sasaran Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu.

Hambatan dalam pencapaian sasaran :

- d. Kurangnya pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi yang masih berkreteria aktif dan sehat hal ini dikarenakan tersebarnya koperasi-koperasi tersebut di 8 (delapan) kecamatan.
- e. Dukungan anggaran yang tidak memadai untuk melakukan pembinaan koperasi dilapangan.
- f. Usaha Kecil Menengah yang ada banyak yang tidak memiliki izin usaha yang di persyaratkan sehingga tidak terdaftar di data Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah ketika akan dilakukan verifikasi untuk melakukan peningkatan status usaha (Mikro, Kecil dan Menengah maupun Besar). Kurangnya anggaran dalam melakukan verifikasi data ke lapangan terhadap usaha-usaha yang ada.

Strategi/Solusi pemecahan masalah :

- Menyediakan anggaran yang memadai karena kekurangan anggaran yang ada merupakan hal penentu dalam menjaga agar koperasi tetap aktif dan sehat ini dilakukan dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang tersebar tersebut.

- Menyediakan anggaran yang memadai dalam memperlancar proses verifikasi data usaha kecil dan menengah.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 2 (Dua) program yaitu : Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan laporan realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja diketahui bahwa rata-rata realisasi keuangan mencapai 85,97 persen, hal ini dipandang cukup efisien dalam penggunaan sumber daya.

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pencapaian kinerja sasaran ” Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah” untuk mewujudkan kualitas koperasi dan usaha mikro kecil menengah ditunjang dengan, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan 1 (satu) kegiatan dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan 2 (Dua) kegiatan.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Sasaran 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

i. Analisis Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut:

N O	INDIKATOR SASARAN	SATUA N	TARGE T	REALISA SI	CAPAIA N	KRITERIA
1.	Nilai AKIP		B	BB	BB	Baik/ Berhasil

Berdasarkan tabel diatas kinerja sasaran ” Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah” secara rata-rata sebesar BB berada pada kategori Berhasil. Dari Satu indikator yang diukur, indikator tersebut tingkat capaiannya BB. Maka tingkat efektifitas yang bisa dicapai tahun 2023 sebesar BB.

- j. Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	TARGET JANGKA MENENGAH	CAPAIAN S/D 2019 TERHADAP 2020 (%)
1.	Nilai AKIP	Huruf	BB	BB	A	BB

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan target jangka menengah maka capaian masing-masing indikator yang menggambarkan kinerja sasaran Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan kegagalan merupakan dua indikator yang saling berhubungan dimana tingkat keberhasilan ditentukan oleh antisipasi dari organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan target tertentu.

Hambatan dalam pencapaian sasaran :

Tidak tercapainya sasaran indikator yang sudah ditetapkan

Strategi/Solusi pemecahan masalah :

Melaksanakan Target dengan komitmen Bidang-bidang yang ada.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini didukung oleh 1 (Satu) program yaitu : Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan.

- k. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan laporan realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja diketahui bahwa rata-rata realisasi keuangan mencapai 89,13 persen, hal ini dipandang cukup efisien dalam penggunaan sumber daya.

- 1. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pencapaian kinerja sasaran ” Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah” untuk mewujudkan Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditunjang dengan, Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan dengan 1 (satu) kegiatan.

Ikhtisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

**Program Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan**

Kegiatan								
Uraian		Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	%	Fisi k %
1		2		3	4	5	6	7
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Dana Tersedia	Rupiah	25.597.500,00	21.414.700,00	83,65	100
		Output	- Dokumen Kinerja Dan Keuangan	Dokumen	11	11	100	
		Outcome	Dokumen Yang Disusun sesuai Aturan	Dokumen	11	11	100	
	JUMLAH				25.597.500,00	21.414.700,00	83,65	

Berdasarkan tabel diatas, jumlah target anggaran yang mendukung sasaran adalah Rp. 25.597.500,00 sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 21.414.700,00 sehingga persentase 83,65 % dengan tingkat efisiensi sebesar 1,06 %. Dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2023**

TAHUN	TARGET BELANJA SASARAN (Rp)	REALISASI SASARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)	EFISIENSI (%)
2023	25.597.500,00	21.414.700,00	83,65	1,06

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Realiasi Pelaksanaan Anggaran Belanja untuk tahun anggaran 2019 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
- 2) Realisasi Anggaran Belanja Belanja Langsung

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

I. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah sebesar Rp. 4.568.459.654,00 atau 55,83 % dari dana yang tersedia dalam DPA dan DPPA sebesar Rp. 8.182.431.407,00 dengan rincian sebagai berikut :

KOMPONEN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
		Realisasi	%	
1	2	3	4	5
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.568.459.654,00	4.056.350.632,00	87,07	602.109.022,00

II. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.201.419.929,00 atau 89,13 % dari dana yang tersedia dalam DPA dan DPPA sebesar Rp. 4.713.883.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 512.463.071,00.

Adapun rincian berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
	BELANJA LANGSUNG	6.119.627.477		87,07	602.109.022
1	Belanja Barang dan Jasa	4.658.459.654	4.201.419.929	87,07	602.109.022
2	Belanja Modal	655.994.477	655.994.477	100	0
3	Belanja Pegawai	804.750.000	788.300.000	97,95	16.450.000

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Penerapan konsep akuntabilitas untuk mencapai pemerintahan yang baik dimulai dengan langkah awal pengembangan perencanaan strategis (Renstra). Pada dasarnya keberhasilan atau kegagalan dari seorang Pimpinan OPD sangat ditentukan oleh ketersediaan dari sumber daya yang ada, terutama sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai. Dan pada hakekatnya keberadaan suatu organisasi semestinya harus standar, yang artinya harus dapat melaksanakan kinerja dengan baik. Oleh karena itu, semua kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan SDM yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta ketersediaan anggaran harus dapat memposisikan suatu OPD untuk dapat bekerja dengan produktif, efektif dan efisien.

Ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka melalui Kegiatan Tahun Anggaran 2023, yaitu :

1. Tertibnya Perizinan yang dikeluarkan dan Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan aturan yang berlaku melalui Kegiatan Penyediaan Jasa Operasional Perizinan.
2. Tertibnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik atau per semester oleh perusahaan PMDN/PMA melalui Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Tersebar nya data dan informasi hasil-hasil pembangunan serta potensi daerah kepada masyarakat melalui kegiatan Pameran pembangunan Daerah.
4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka yang lebih berkompeten melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.
5. Tersebar nya informasi tentang potensi daerah dan peluang investasi kepada Investor melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi.
6. Terlaksananya pembinaan koperasi agar tetap aktif dan sehat melalui Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.
7. Terlaksananya pembinaan usaha kecil dan menengah yang memiliki izin dan meningkatkan status usaha yang ada menjadi usaha yang berdaya saing melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

## B. HAMBATAN KENDALA

### 1. *Permasalahan Di Bidang Ketatalaksanaan*

Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka, namun dalam Peraturan Bupati tersebut masih belum semua dilimpahkan dan masih ada beberapa perizinan yang masih dilakukan oleh Dinas Teknis.

### 2. *Permasalahan Di Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur*

- Sumber Daya Aparatur setingkat Pelaksana/Staf belum optimal dalam pemanfaatan kemampuan kompetensinya, dengan konsekuensi atas masalah tersebut menyebabkan pencapaian target kinerja tidak optimal. Hal ini dikarenakan hanya tertumpu pada satu orang.
- Masih adanya kompetensi Sumber Daya Aparatur setingkat pejabat struktural yang belum optimal pemberdayaannya, sehingga pelaksanaan fungsi manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penguatan kelembagaan tidak berjalan efektif dalam upaya mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik.
- Masih rendahnya Etos Kerja Sumber Daya Aparatur yang ada.

## C. PEMECAHAN MASALAH

Kebijakan yang diambil guna mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

### 1. Bidang Ketatalaksanaan

Melaksanakan rapat-rapat koordinasi antar instansi teknis khususnya dalam setiap penyusunan draf aturan-aturan yang berhubungan dengan perizinan maupun langkah-langkah penerbitan perizinan yang melibatkan lintas sektoral.

### 2. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

- Memberdayakan Sumber Daya Aparatur Setingkat Pelaksana/Staf atau melakukan rotasi terhadap staf yang kurang optimal, dengan bantuan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- Melakukan evaluasi setiap bulannya guna mengukur sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan perbidangnya.
- Khusus setingkat pejabat struktural agar melakukan evaluasi dan membuat suatu rasume baik berupa perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan disetiap bidangnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai BB
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai BAIK
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 6 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.182.431.407,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 7.381.854.429,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 800.567.978,00.

Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka 2019 - 2023 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2023, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai BB
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai BAIK
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 8.182.431.407,00 (delapan milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka adalah 28,63 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bangka.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka kepada pihak-pihak terkait baik sebagai

stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka.

NO	Kode Rekening	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	KONTAK					LOKASI	RISK (%)	KEUANGAN		88A DANA	NET															
				MULAI	NOMOR		MULAI	SELESAI			PELAKSANA																		
					TANGGAL	TANGGAL																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15															
1	2.17.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan, Kelengkapan, serta Administrasi Kopresi Kelembagaan Kolaborasi Kaca	8.700.000,00							0,00	9.280.000,00	95,30	480.000,00																
															6.101.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjembah Pengelola Keuangan	480.000,00	-	-										
															6.1.02.04.01.0001	Perjalanan Dinas Biasa	2.050.000,00	100,00	-	-									
															6.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00	100,00	-	-									
															2.1.17.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan Pemahaman dan Penguatan Partisipasi serta Kapasitas dan Kepertani SDM Kopresi	222.418.600,00												
2	6.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjembah Pengelolaan Keuangan	600.000,00							0,00	690.000,00	100,00	-																
															6.1.02.01.01.0024	Belanja Ausdahan untuk Kegiatan Kantor-Aid Tula Kantor	3.527.850,00	0,00	2.404.450,00	68,15	1.123.600,00	-							
															6.1.02.01.01.0028	Belanja Ausdahan untuk Kegiatan Kantor-Ketua dan Cower	248.850,00	0,00	228.000,00	-	20.850,00	-							
															6.1.02.01.01.0030	Belanja Ausdahan untuk Kegiatan Kantor-Gabian Komputer	1.311.954,00	0,00	1.132.000,00	-	179.954,00	-							
															6.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Baget	33.890.000,00	0,00	33.389.000,00	98,23	501.000,00	-							
															6.1.02.02.01.0008	Honorarium Pengkajian atau Pendampingan	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	100,00	-	-							
															6.1.02.01.00.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	100,00	-	-							
															6.1.02.02.02.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempati Perumahan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	-	-							
															6.1.02.02.02.0043	Belanja Sewa Hotel	24.700.000,00	0,00	24.000.000,00	97,17	700.000,00	-							
															6.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.508.145,00	0,00	7.900.331,00	83,09	1.607.814,00	-							
															6.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.400.000,00	0,00	23.278.800,00	95,39	2.121.000,00	-							
															6.1.02.02.02.0001	Belanng jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00	-	-							
															2.1.17.07.2.01.01	Sub Kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Usaha Mikro	8.445.000,00	0,00	8.505.000,00	99,84	2.550.000,00	-							
															3	6.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjembah Pengelolaan Keuangan	450.000,00							0,00	-	-	480.000,00	
6.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.495.000,00	0,00	2.824.000,00	75,11	671.000,00	-																						
4	2.1.17.02.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjual Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Penguatan, Pemahaman, SDM, serta Desain dan Teknologi	284.316.000,00							0,00	286.308.644,00	93,08	17.989.182,00																
															6.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjembah Pengelolaan Keuangan	2.070.000,00	0,00	690.000,00	33,33	1.380.000,00	-							
															6.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.348.500,00	0,00	8.844.000,00	94,02	504.500,00	-							
															6.1.02.01.01.0014	Belanja Ausdahan untuk Kegiatan Kantor-Aid 1 Lini Kantor	8.355.830,00	0,00	7.235.150,00	84,15	1.120.680,00	-							
															6.1.02.01.01.0018	Belanja Ausdahan untuk Kegiatan Kantor-Ketua dan Cower	414.170,00	0,00	378.000,00	90,42	36.170,00	-							
5	6.1.02.01.01.0003	Belanja Ausdahan Untuk Kegiatan Kantor-Aid/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.094.800,00	4.440.000,00	004.820PBLUP/DN/PM PCK/UM/2023 Tanggal 03 April 2023	03-Apr-23	10-Apr-23	Cy/Vedhastika Copy Centre	Sungailiat	0,00	4.440.000,00	89,11	604.800,00																
															6.1.02.01.01.0003	Belanja Makanan dan Minuman Rapiel	51.615.000,00	0,00	51.288.200,00	99,37	326.600,00	-							
															6.1.02.02.01.0004	Honorarium Pengkajian atau Pendampingan	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00	-	-	-							
															6.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	-	-	-							
															6.1.02.02.02.0008	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempati Perumahan	45.000.000,00	0,00	43.450.000,00	97,00	1.550.000,00	-							
															6.1.02.02.02.0043	Belanja Sewa Hotel	37.560.000,00	0,00	37.176.000,00	-	428.000,00	-							
															6.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.407.320,00	0,00	17.108.488,00	63,11	9.998.832,00	-							
															6.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.200.000,00	0,00	38.223.000,00	95,09	1.978.000,00	-							
															2.1.16.1.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RPA-SKPD	8.000.000,00	0,00	4.201.600,00	64,10	785.000,00	-							
															6.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjembah Pengelolaan Keuangan	450.000,00	0,00	480.000,00	100,00	-	-							
6.1.02.01.01.0024	Belanja Ausdahan untuk Kegiatan Kantor-Aid Tula Kantor	540.000,00	28.000,00	027004000002010106/2023 dan 14 Februari 2023	14-Feb-23	28-Feb-23	Cy/Vedhastika Copy Centre	Sungailiat	0,00	544.000,00	99,44	3.000,00																	

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK										SISA DATA	KET
				REK	NOMOR	REK	SELISIR	PELUKSI	LOKASI	FRK (%)	KEJUJARAN		KEU (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.1.02.01.01.0023	Biaya Asuransi untuk Kegiatan Kantor Keras dan Cover	504.000,00	344.000,00	027904CHMP2XUK M2023 dan 14 Februari 2023	14-Feb-23	28-Feb-23	Cv. Yushinta Copy Centre	Bungailat	0,00	344.000,00	78,17	110.000,00		
	5.1.02.01.01.0029	Biaya Asuransi untuk Kegiatan Kantor Bahan Komplet	3.486.820,00	2.815.000,00	027904CHMP2XUK M2023 dan 14 Februari 2023	14-Feb-23	28-Feb-23	Cv. Yushinta Copy Centre	Bungailat	0,00	2.815.000,00	80,50	681.820,00		
6	2.18.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.685.000,00							0,00	4.179.500,00	89,21	505.500,00		
	5.1.01.03.07.0001	Biaya Honorarium Pemengantar/Pengantar Pengeluaran Keuangan	490.000,00							0,00	490.000,00	100,00	-		
	5.1.02.01.01.0024	Biaya Asuransi untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	710.890,00	156.000,00	027904CHMP2XUK M2023 dan 14 Februari 2023	14-Feb-23	28-Feb-23	Cv. Yushinta Copy Centre	Bungailat	0,00	704.890,00	99,09	6.000,00		
	5.1.02.01.01.0025	Biaya Asuransi untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	414.750,00	355.000,00	027904CHMP2XUK M2023 dan 14 Februari 2023	14-Feb-23	28-Feb-23	Cv. Yushinta Copy Centre	Bungailat	0,00	355.000,00	85,59	59.750,00		
	5.1.02.01.01.0029	Biaya Asuransi untuk Kegiatan Kantor Bahan Komplet	3.108.260,00	2.879.000,00	027904CHMP2XUK M2023 dan 14 Februari 2023	14-Feb-23	28-Feb-23	Cv. Yushinta Copy Centre	Bungailat	0,00	2.879.000,00	92,67	479.260,00		
7	2.18.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Baku Realisasi Kinerja SKPD	15.817.460,00							0,00	13.039.200,00	82,69	2.848.260,00		
	5.1.01.03.07.0001	Biaya Honorarium Pemengantar/Pengantar Pengeluaran Keuangan	450.000,00							0,00	450.000,00	100,00	-		
	5.1.02.01.01.0024	Biaya Asuransi untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	3.080.500,00	277.700,00	027904CHMP2XUK M2023 dan 14 Februari 2023	14-Feb-23	28-Feb-23	Cv. Yushinta Copy Centre	Bungailat	0,00	1.277.700,00	41,48	1.802.800,00		
	5.1.02.01.01.0025	Biaya Asuransi untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	820.500,00	716.000,00	027904CHMP2XUK M2023 dan 14 Februari 2023	14-Feb-23	28-Feb-23	Cv. Yushinta Copy Centre	Bungailat	0,00	716.000,00	86,59	119.500,00		
	5.1.02.01.01.0029	Biaya Asuransi untuk Kegiatan Kantor Bahan Komplet	6.300.000,00	5.340.800,00	027904CHMP2XUK M2023 dan 14 Februari 2023	14-Feb-23	28-Feb-23	Cv. Yushinta Copy Centre	Bungailat	0,00	5.340.800,00	84,78	960.200,00		
	5.1.02.02.01.0071	Biaya Lain-lain	3.812.500,00							0,00	3.812.500,00	100,00	-		
	5.1.02.04.01.0001	Biaya Perjalanan Dinas Biasa	1.840.000,00							0,00	1.840.000,00	100,00	-		
8	2.18.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan ASN	4.658.469.664,00							0,01	4.658.350.832,00	87,07	602.109.832,00		
	5.1.01.01.01.0001	Biaya Cetak Pustaka PHS	1.759.292.808,00							0,04	1.754.868.533,00	99,81	2.424.275,00		
	5.1.01.01.01.0002	Biaya Cetak Pustaka PHS	91.403.000,00							0,09	14.832.200,00	16,23	76.567.800,00		
	5.1.01.01.02.0001	Biaya Tunjangan Kelangka PHS	159.774.148,00							0,03	153.478.868,00	96,05	2.295.280,00		
	5.1.01.01.02.0002	Biaya Tunjangan Kelangka PHS	12.796.000,00							0,09	1.779.800,00	13,97	11.016.200,00		
	5.1.01.01.03.0001	Biaya Tunjangan Jaminan PHS	209.383.750,00							0,03	203.788.500,00	97,33	5.595.250,00		
	5.1.01.01.04.0001	Biaya Tunjangan Fungsional PHS	173.824.000,00							0,29	5.680.000,00	3,28	167.144.000,00		
	5.1.01.01.04.0002	Biaya Tunjangan Fungsional PHS	10.060.000,00							0,09	2.700.000,00	26,78	7.360.000,00		
	5.1.01.01.05.0001	Biaya Tunjangan Fungsional PHS	32.136.875,00							3,95	31.525.000,00	98,10	611.875,00		
	5.1.01.01.05.0002	Biaya Tunjangan Fungsional PHS	95.034.551,00							3,96	92.947.290,00	97,85	2.087.261,00		
	5.1.01.01.06.0001	Biaya Tunjangan Biasa PHS	8.520.000,00							0,09	1.096.500,00	12,75	7.423.500,00		
	5.1.01.01.07.0001	Biaya Tunjangan Per/Tunjangan Khusus PHS	12.465.540,00							0,94	11.828.875,00	95,65	636.665,00		
	5.1.01.01.08.0001	Biaya Tunjangan Cag PHS	112.244,00							0,04	23.182,00	20,65	89.062,00		
	5.1.01.01.08.0002	Biaya Tunjangan Cag PHS	304.000,00							0,00	304.000,00	0,21	200.000,00		
	5.1.01.01.09.0001	Biaya Tunjangan Jaminan Kesehatan PHS	5.040.000,00							4,81	131.205.123,00	64,77	23.873.877,00		
	5.1.01.01.10.0001	Biaya Tunjangan Jaminan Kesehatan PHS	4.042.184,00							1,04	772.485,00	19,13	4.269.669,00		
	5.1.01.01.10.0002	Biaya Tunjangan Jaminan Kesehatan PHS	252.000,00							0,00	3.503.147,00	89,14	439.852,00		
	5.1.01.01.11.0001	Biaya Tunjangan Jaminan Kesehatan PHS	11.251.814,00							3,22	35.000,00	0,31	216.814,00		
	5.1.01.01.11.0002	Biaya Tunjangan Jaminan Kesehatan PHS	700.000,00							0,00	10.809.480,00	99,07	442.134,00		
												15,26	881.204,00		

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTRAK				PELAYAN	LOKASI	PERS. (%)		KEUANGAN		SISA DATA	NET
				NO	TANGGAL	MULAI	SELESAI			T1	T2	KEU (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Smpunan Peserta Tabung Penerimaan Rakyat PMS	271.250,00							0,00	-	-	271.250,00		
	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Peserta Kerja PMS	1.862.487.200,00							0,00	1.830.842.500,00	96,16	281.624.700,00		
	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Peserta Kerja PMS	24.700.000,00							0,00	-	-	24.700.000,00		
9	2.18.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan SKPD	15.233.440,00							0,00	15.233.440,00	100,00	-		
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	300.000,00							0,00	300.000,00	100,00	-		
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.833.440,00							0,00	14.833.440,00	100,00	-		
10	2.18.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengawasan Laporan Keuangan	10.000.000,00							0,00	9.983.000,00	99,83	17.000,00		
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	300.000,00							0,00	300.000,00	100,00	-		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Audit/Revisi untuk Kegiatan Kantor Akut Tula Kantor	943.000,00							0,00	943.000,00	100,00	-		
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Audit/Revisi untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.617.000,00							0,00	1.600.000,00	98,95	17.000,00		
	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lain-lain	7.140.000,00							0,00	7.140.000,00	100,00	-		
11	2.18.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Keanggotaannya	9.700.000,00							0,00	9.250.000,00	95,56	450.000,00		
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	900.000,00							0,00	450.000,00	50,00	450.000,00		
	5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian Garmen	8.800.000,00							0,00	8.800.000,00	100,00	-		
12	2.18.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.679.830,00							0,00	13.679.830,00	100,00	-		
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	450.000,00							0,00	450.000,00	100,00	-		
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.229.830,00							0,00	13.229.830,00	100,00	-		
13	2.18.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.843.819,00							2,07	343.843.819,00	99,56	1.999.999,00		
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	600.000,00							0,00	600.000,00	100,00	-		
	5.1.02.01.01.0082	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.040.000,00							0,00	31.040.000,00	99,92	24.000,00		
	5.1.02.01.01.0083	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tahun	4.451.750,00							0,00	4.451.750,00	100,00	-		
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	319.241.060,00							2,27	317.072.143,00	99,31	2.168.917,00		
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.120.000,00							3,33	10.120.000,00	100,00	-		
14	2.18.01.2.06.10	Sub Kegiatan Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan SKPD	28.680.000,00							0,00	21.809.451,00	76,04	6.870.549,00		
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	450.000,00							0,00	450.000,00	100,00	-		
	5.1.02.01.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.350.000,00							0,00	19.200.000,00	75,74	6.150.000,00		
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jamuan Kesehatan bagi Non ASN	1.960.000,00							0,00	1.239.481,00	74,97	720.519,00		
	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jamuan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	46.152,00							0,00	34.614,00	75,00	11.538,00		
	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jamuan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	1.153.846,00							0,00	868.386,00	75,00	285.460,00		
15	2.18.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	30.488.180,00							0,00	30.030.000,00	98,50	458.180,00		
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	300.000,00							0,00	300.000,00	100,00	-		
	5.1.02.02.02.0001	Belanja Mebel	30.188.180,00							0,00	29.732.000,00	98,48	456.180,00		
16	2.18.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Mebel Lainnya	71.842.800,00							0,00	68.900.000,00	97,66	2.942.800,00		
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	600.000,00							0,00	600.000,00	100,00	-		
	5.1.02.02.01.0003	Belanja Mebel	49.000.000,00							0,00	44.000.000,00	97,77	5.000.000,00		

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTAK					PELAKSANA	LOKASI	RISIKO (%)			KEUANGAN		SISA DANA	KET
				MELAI	NOMOR		MULAI	SELESAI			FISIK (%)	KEUANGAN	KEU (%)				
					5	6								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
12.02.18.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Sub Kegiatan Pemeliharaan Personal Computer	25.950.000,00	25.950.000,00	007.03PBLJSP/DGNP/PRJUKM/2023	15-Mei-23	22-Mei-23	CV. Anah Elektronik (Tjua Bin Min	Jl.Jend Sudirman No.85Sungailar	0,00	25.950.000,00	97,46	660.000,00				
17	2.18.07.2.00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Siret Meryanti	777.504.600,00							0,00	777.504.600,00	99,25	6.513.341,00				
5.1.01.03.07.0001	Belanja honorarium Pemangku/anggota Penyelidikan Keuangan		1.660.000,00							0,00	640.000,00	50,00	640.000,00				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Asat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor		32.781.500,00							0,00	26.578.150,00	94,47	1.811.379,00				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Asat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover		6.363.000,00							0,00	6.108.000,00	95,95	258.000,00				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Asat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pua		1.500.000,00							0,00	1.500.000,00	100,00	-				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		304.200.000,00							0,00	304.200.000,00	100,00	-				
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		304.200.000,00							0,00	302.150.000,00	99,33	2.050.000,00				
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamaman		25.350.000,00							0,00	25.350.000,00	100,00	-				
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Cairta		25.350.000,00							0,00	25.350.000,00	100,00	-				
5.1.02.02.01.0062	Belanja Lapangan Jamsil/Dart Kader/Majalah		1.200.000,00							0,00	900.000,00	75,00	300.000,00				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bag Non ASN		43.660.000,00							0,00	43.621.029,00	99,84	158.971,00				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Korp bag Non ASN		1.199.952,00							0,00	1.196.104,00	99,66	3.848,00				
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bag Non ASN		30.000.048,00							0,00	29.803.894,00	99,66	96.154,00				
18	2.18.07.2.00.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi/Sender Dapur Air dan Lampu	123.324.540,00							0,07	93.172.506,00	75,55	20.152.232,00				
5.1.01.02.01.0001	Belanja Honorarium Pemangku/anggota Penyelidikan Keuangan		600.000,00							0,00	600.000,00	100,00	-				
5.1.02.01.01.0031	Belanja Asat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis		8.196.000,00							0,00	8.196.000,00	100,00	-				
5.1.02.02.01.0049	Belanja T Kopong Air		6.528.450,00							5,29	6.484.240,00	74,57	1.668.710,00				
5.1.02.02.01.0051	Belanja T Kopong Listrik		90.000.000,00							6,37	62.018.339,00	69,80	27.191.641,00				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Koneksi Kabel/Internet/TV Berlangganan		16.000.000,00							7,78	16.009.629,00	82,28	1.396.367,00				
19	2.18.07.2.00.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.164.279,00							0,07	67.83.406,00	99,41	400.823,00				
5.1.01.02.07.0001	Belanja Honorarium Pemangku/anggota Penyelidikan Keuangan		600.000,00							0,00	600.000,00	100,00	-				
5.1.02.01.01.0030	Belanja Asat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Pribadi Kantor		1.351.195,00							0,00	1.194.870,00	81,77	246.325,00				
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		50.700.000,00							0,00	50.700.000,00	100,00	-				
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Penyelidikan Sampah		600.434,00							0,26	600.000,00	99,10	5.534,00				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bag Non ASN		3.360.000,00							0,00	3.358.529,00	99,95	1.464,00				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Korp bag Non ASN		82.304,00							0,00	82.304,00	100,00	-				
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bag Non ASN		2.307.696,00							0,00	2.307.696,00	100,00	-				
5.2.02.06.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Phone Line)		9.147.600,00			06-Jun-23	06-Jul-23	CV Centria Negera (Centria Wad)	Jl.Pondok No.8 Tegal, Kabupaten Keb Bangsan	0,26	9.000.000,00	98,39	147.600,00				
20	2.18.07.2.00.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan, Pajal dan Perbaikan Kendaraan Dalam Operasional dan Lapangan	153.418.000,00							2,97	143.064.848,00	94,56	8.345.651,00				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pemangku/anggota Penyelidikan Keuangan		600.000,00							0,00	600.000,00	100,00	-				
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Supir		53.100.000,00							0,00	53.100.000,00	100,00	-				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bag Non ASN		3.360.000,00							0,00	3.358.529,00	99,96	1.464,00				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Korp bag Non ASN		82.304,00							0,00	82.304,00	100,00	-				
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bag Non ASN		2.307.696,00							0,00	2.307.696,00	-	-				
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor Kendaraan Dalam Bermotor Pengeran		38.250.000,00			06-Jun-23	26-Jun-23	CV.Anggah Empat Lumbajang Lumbajang Gunung	Jl.Jend Sudirman No.135 B	7,32	38.096.800,00	99,60	153.200,00				
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor Kendaraan Dalam Bermotor Pengeran		40.000.000,00					CV.Anggah Empat Lumbajang Lumbajang Gunung	Jl.Jend Sudirman No.135 B	4,38	39.847.200,00	99,67	52.700,00				
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor Kendaraan Dalam Bermotor Benda Daa		15.610.000,00							0,00	7.672.313,00	47,87	8.137.687,00				

NO	Kode Rekening	PROGRAM / REKAMATAN	ANGGARAN	KONTROL				PELAKSANA	LOKASI	TSPK (%)	KEJANGKUAN		SISA DATA	KET
				REKAM	NONOR	REKAM	SELESAI				12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	2.18.01.2.08.08	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	16.810.000,00							0,00	16.810.000,00	98,45	280.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengawasan Keuangan	890.000,00							0,00	890.000,00	100,00	-	
	5.1.02.03.02.01.21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Rumah Tangga	5.480.000,00							0,00	5.480.000,00	-	15.000,00	
	5.1.02.03.02.04.11	Belanja Pemeliharaan Komputer Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya	10.530.000,00							0,00	10.530.000,00	97,70	246.000,00	
22	2.18.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.450.000,00							0,00	20.450.000,00	98,24	380.000,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengawasan Keuangan	450.000,00							0,00	450.000,00	100,00	-	
	5.1.02.03.02.00.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempel Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00							0,00	19.640.000,00	98,20	380.000,00	
23	2.18.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pula Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Bangkai	87.248.458,00							0,00	86.435.631,00	97,91	1.423.927,00	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.281.500,00							0,00	-	-	1.281.500,00	
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.325.100,00							0,00	1.160.000,00	83,01	225.100,00	
	5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rasak	3.190.000,00							0,00	3.170.000,00	97,81	70.000,00	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.452.898,00							0,00	28.452.898,00	100,00	-	
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00							0,00	2.880.000,00	96,00	180.000,00	
	5.1.02.06.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lainnya	54.000.000,00							0,00	48.902.873,00	99,81	97.327,00	
24	2.18.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Kegiatan Promosi Pemerintahan Modal Daerah KabupatenKotabaru	63.569.320,00							0,00	63.569.320,00	100,00	-	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengawasan Keuangan	300.000,00							0,00	300.000,00	-	-	
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.575.000,00							0,00	1.575.000,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.890.000,00							0,00	1.890.000,00	100,00	-	
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.328.250,00							0,00	1.328.250,00	100,00	-	
	5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	25.000.000,00							0,00	25.000.000,00	100,00	-	
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.478.870,00							0,00	33.478.870,00	100,00	-	
25	2.18.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perumahan dan Kependudukan Berbasis Sistem Pelayanan Perumahan Bermuta Berkualitas Berbasis Elektronik	615.235.238,00							0,00	604.034.878,00	92,33	47.200.660,00	
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengawasan Keuangan	840.000,00							0,00	840.000,00	100,00	-	
	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kelembaan	16.500.000,00							0,00	8.250.000,00	50,00	8.250.000,00	
	5.1.02.02.01.0040	Belanja Tugasan Air	2.500.000,00							0,00	2.353.720,00	94,15	146.280,00	
	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tugasan Listrik	10.000.000,00							0,00	3.007.500,00	30,08	6.992.500,00	
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Koneksi/Asuransi/Internet/TV Berlangganan	13.000.000,00							0,00	-	-	13.000.000,00	
	5.1.02.02.02.0005	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	860.000,00							0,00	419.817,00	42,94	660.183,00	
	5.1.02.02.02.0006	Belanja Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Non ASN	23.079,00							0,00	11.538,00	50,00	11.538,00	
	5.1.02.02.02.0007	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	578.924,00							0,00	288.482,00	50,00	288.482,00	

No	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTAK						PELAKSANA	LOKASI	PSIK (%)	KEUANGAN		KEU (%)	BSA DATA	NET
				MULAI	NOMOR		MULAI	SELESAI	17				18				
					TAMBAH	BARU											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
5.1.02.02.08.0019		Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pelaksanaan-Jasa Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.500.000,00							0,00	-	-	4.500.000,00				
5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.020.041,00							0,00	20.020.041,00	100,00	-				
5.2.02.05.01.0005		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.195.000,00							0,00	-	-	6.195.000,00				
5.2.02.05.02.0004		Belanja Modal Alat Peredangin	3.549.840,00	2.950.000,00	010.03PPB/BJSP/DI/PPM/PSY/UM/2023 Tanggal 6 Juni 2023	06-Jun-23	13-Jun-23	CV/Amn Elektronik	Jl.Lend Sudirman No.08Bungailat Bangka	0,00	2.950.000,00	83,10	899.840,00				
5.2.02.05.02.0004		Belanja Modal Alat Rumah Tinggal Lainnya (Home Use)	17.221.745,00	18.750.000,00	010.03PPB/BJSP/DI/PPM/PSY/UM/2023 Tanggal 6 Juni 2023	06-Jun-23	13-Jun-23	CV/Amn Elektronik	Jl.Lend Sudirman No.08Bungailat Bangka	0,00	18.750.000,00	96,70	871.745,00				
5.2.02.05.02.0007		Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.200.000,00	4.182.500,00	010.03PPB/BJSP/DI/PPM/PSY/UM/2023 Tanggal 6 Juni 2023	06-Jun-23	13-Jun-23	CV/Amn Elektronik	Jl.Lend Sudirman No.08Bungailat Bangka	0,00	4.182.500,00	99,11	37.500,00				
5.2.02.06.01.0001		Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.000.850,00	3.200.000,00	010.03PPB/BJSP/DI/PPM/PSY/UM/2023 Tanggal 6 Juni 2023	06-Jun-23	13-Jun-23	CV/Amn Elektronik	Jl.Lend Sudirman No.08Bungailat Bangka	0,00	3.200.000,00	91,44	308.850,00				
5.2.02.10.01.0003		Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	144.855.000,00	143.250.000,00	027.0610B/DI/PPM/PSY/UM/2023 Tanggal 04 April 2023	04-Apr-23	18-Apr-23	CV/Primer Inhibisi	Jl.Koba Km.10 No.38 Kel.Lanjut Kec. Panglisan Bant Kab. Bangka Tengah	0,00	143.250.000,00	98,89	1.605.000,00				
5.2.02.16.02.0003		Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	54.474.240,00	52.960.000,00	027.0610B/DI/PPM/PSY/UM/2023 Tanggal 04 April 2023	04-Apr-23	18-Apr-23	CV/Primer Inhibisi	Jl.Koba Km.10 No.38 Kel.Lanjut Kec. Panglisan Bant Kab. Bangka Tengah	0,00	52.960.000,00	97,22	1.514.240,00				
5.2.02.16.02.0003		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempel Kerja Lainnya	311.460.522,00							0,00	308.871.000,00	99,16	2.619.522,00				
2.18.04.2.01.02		Sub Kegiatan Pemenuhan Pemenuhan Kontinuitas Perawatan dan Nopertetuan Pemenuhan Model	28.378.700,00							0,00	30.887.400,00	60,43	7.509.200,00				
5.1.01.02.01.0001		Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat	860.000,00							0,00	860.000,00	100,00	-				
5.1.02.01.01.0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	5.362.100,00	2.882.400,00	027.0611B/DI/PPM/PSY/UM/2023	01-Mar-23	08-Mar-23	CV/Primer Yaman Hmtl	Bungailat	0,00	2.882.400,00	53,20	2.809.700,00				
5.1.02.01.01.0025		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	6.353.000,00	6.100.000,00	027.0611B/DI/PPM/PSY/UM/2023	01-Mar-23	08-Mar-23	CV/Primer Yaman Hmtl	Bungailat	0,00	6.100.000,00	95,87	253.000,00				
5.1.02.01.01.0029		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	21.050.400,00	19.825.000,00	027.0611B/DI/PPM/PSY/UM/2023	01-Mar-23	08-Mar-23	CV/Primer Yaman Hmtl	Bungailat	0,00	19.825.000,00	94,18	1.225.400,00				
5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.811.200,00							0,00	1.400.000,00	28,51	3.811.200,00				
2.18.05.2.01.01		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Pelaksanaan Pemenuhan Model	28.644.000,00							0,00	35.964.103,00	98,14	679.887,00				
5.1.01.02.01.0001		Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat Pengabdian Masyarakat	300.000,00							0,00	300.000,00	100,00	-				
5.1.02.01.01.0024		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	568.000,00							0,00	-	-	568.000,00				
5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.779.000,00							0,00	27.664.103,00	99,60	111.887,00				
5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00							0,00	8.000.000,00	100,00	-				

NO	Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KONTAK				PELAKSANA	LOKASI	KEUANGAN				BISA DANA	KET
				MULAI	TANGGAL	MULAI	SELESAI			PRSK (%)	KELUANGAN	KEU (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
28	2.18.02.02.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Pemantauan Model	342.520.000,00							0,00	299.712.000,00	87,50	42.807.600,00		
	6.1.02.01.01.0024	Belanja Anggaran untuk Kegiatan Kantor Akut Tula Kantor	9.840.000,00								8.730.000,00		918.000,00		
	6.1.02.01.01.0028	Belanja Barang Untuk Dupa/Darwahan Kepala Masyarakat	94.234.800,00	82.884.000,00	027/04/03/04/04/02 KUM/2023 Tanggal 22 Februari 2023	22-Feb-23	28-Feb-23	CV/Petrus Yaman Humi	Sungailiat	0,00	90.842.000,00	90,40	3.392.400,00		
	6.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	145.995.000,00	109.200.000,00	027/02.04/03/04/03/02/03 DPM/2023/UM/2023 Tanggal 28/Februari/2023	28-Feb-23	16-Mar-23	CV/Griya Pusana Hoselid/ Ir. Thomas Jatman JMI	Jl.Pahlawan XI Ruko Cading Sentosa No.3AB, Kec.Latim, Kab.Sungailiat Kedapungan Bangs	0,00	136.440.000,00	93,46	9.555.000,00		
	6.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembina/Moderator/Pembawa Acara dan Panitia	55.650.000,00							0,00	36.190.000,00	62,85	20.750.000,00		
	6.1.02.02.01.0004	Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan	25.800.000,00							0,00	25.800.000,00	100,00	-		
	6.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.200,00							0,00	2.400.000,00	25,45	8.200.200,00		
29	2.18.05.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Pemantauan Model	88.280.000,00							0,00	74.425.000,00	87,27	10.855.000,00		
	6.1.01.03.01.0001	Belanja Honorarium Pengawasan/ Pembina Keuangan	300.000,00							0,00	-	-	300.000,00		
	6.1.02.01.01.0024	Belanja Anggaran untuk Kegiatan Kantor Akut Tula Kantor	2.500.000,00							0,00	2.500.000,00	100,00	-		
	6.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00							0,00	6.200.000,00	89,96	600.000,00		
	6.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan	48.500.000,00							0,00	42.900.000,00	88,67	6.600.000,00		
	6.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.190.000,00							0,00	23.825.000,00	87,96	3.365.000,00		
TOTAL JUMLAH			8.182.431.407,00							1,89	7.281.954.429,00	90,22	809.571.971,00		

